



**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23  
TAHUN 2018, *SELF ASSESMENT SYSTEM*, DAN OMZET  
PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (UMKM)  
DI KOTA TEGAL**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Tri Mustikasari**

**NPM : 4316500188**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2020**



**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23  
TAHUN 2018, *SELF ASSESMENT SYSTEM* DAN OMZET  
PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (UMKM)  
DI KOTA TEGAL**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada  
Fakultas ekonomi dan bisnis universitas pancasakti tegal

Oleh :

**Tri Mustikasari**

**NPM : 4316500188**

Diajukan Kepada :

**Program Study Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2020**



**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23  
TAHUN 2018, *SELF ASESMENT SYSTEM*, DAN OMZET  
PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (UMKM) DI  
KOTA TEGAL**

**SKRIPSI**

Oleh :

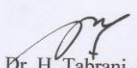
**Tri Mustikasari**

**NPM : 4316500188**

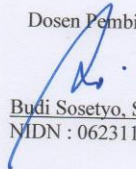
**Disetujui Untuk Ujian Skripsi**

**Tanggal :**

Dosen Pembimbing I

  
Dr. H. Tabrani, M.M  
NIDN : 0612126001

Dosen Pembimbing II

  
Budi Soseyo, S.E., M.Si  
NIDN : 0623117101

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
Aminul Tajir, SE, M.Si  
NIDN : 0602037002



**Pengesahan Skripsi**

Nama : Tri Mustikasari

NPM : 4316500188

Judul : Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,  
*Self Assessment System* dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak UMKM di Kota Tegal


Telah diperiksa dan direvisi berdasarkan saran dari tim penguji seminar proposal,  
yang dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu


Tanggal : 18 Juli 2020

Dan untuk selanjutnya, proposal penelitian untuk skripsi ini dapat dilanjutkan  
pada tahap penelitian skripsi.


Ketua Penguji

  
Dr. H. Tabrani., M.M  
NIDN. 0612126001

Penguji I

  
Subekti., S.E., M.Si  
NIDN. 0618056602

Penguji II

  
Teguh Budi Raharjo S.E., M.M  
NIDN. 0615057601

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
Aminul Fajri., S.E., M.Si, Akt  
NIDN : 0602037002



iii

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **A. Motto**

1. Ibnu Katsir mengatakan, “ Janji Allah itu pasti, tidak mungkin Allah menyelisihinya” (Tafsir Al Quran Al’Azhim, 14/42) Yakinlah bahwa dibalik setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang begitu dekat.
2. Yakin sama Allah, yakin sama diri sendiri, yakin sama potensi dan kemampuan, yakin sama hidup, bahwa hidup akan berproses dan berubah.  
(wirda mansyur)

### **B. Persembahan**

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulis mempersembahkan kepada:

1. Bapak Dulhadi dan Mamah tercinta Umiyati serta adik-kakak saya Mela Yuli W dan juga Dwiyan yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat selama pembuatan skripsi.
2. Teman-teman seperjuangan Tesa, Elis, Trio dan keluarga besar Akuntansi E 2016 yang telah memberikan dukungan dan semangat selama pembuatan skripsi.
3. Almamater tercinta Universitas Pancasakti Tegal.

#### PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tri Mustikasari

NPM : 4316500188

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018, *Self Asesment System*, Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan /atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari fakultas ekonomi dan bisnis universitas pancasakti tegal.
2. Saya mengijinkan untuk dikelola oleh fakultas ekonomi dan bisnis universitas pancasakti tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Tegal, 12 juli 2020

Yang menyatakan,



Tri Mustikasari

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, self assessment system dan omzet penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan rumus slovin diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 22.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan 0,303, Self Assesment System tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan 0,722, dan Omzet penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan 0,001. Hasil dari koefisien determinasi diperoleh  $R^2$  sebesar 0,216 atau 21,6%. Dapat diartikan bahwa 21,6% kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, Self Assesment system dan Omzet penghasilan, sedangkan sisanya 78,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

**Kata kunci: PP No 23 tahun 2018, Self Assesment System, Omzet Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of government regulation number 23 of 2018, self assessment system and income turnover on MSME taxpayer compliance in Tegal City. The type of data used is primary data using the Slovin formula obtained a sample of 100 people. The data collection method uses a questionnaire while the data analysis method used is multiple linear regression analysis using SPSS version 22.*

*The results of this study indicate that government regulation number 23 of 2018 does not affect the compliance of MSME taxpayers with a significant value of 0.303, the Self Assessment System does not affect the compliance of MSME taxpayers with a significant value of 0.722, and income turnover affects the compliance of MSME taxpayers with a significant value .001. The results of the coefficient of determination obtained R<sup>2</sup> of 0.216 or 21.6%. It can be interpreted that 21.6% of UMKM taxpayer compliance is influenced by Government Regulation number 23 of 2018, Self Assessment system and earnings turnover, while the remaining 78.4% is influenced by other factors outside this study.*

*Keywords: PP No 23 2018, Self Assessment System, Earnings Turnover, Taxpayer Compliance*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin* penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian untuk skripsi dengan baik. Skripsi ini terselesaikan atas kemudahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya sehingga saya dapat menyajikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018, *Self Asesment System*, Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tegal”

Tujuan skripsi ini adalah disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Pancasakti Tegal.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, Akt, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Aminul Fajri, S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. H. Tabrani, M.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan ini.
4. Budi Susetyo, S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberika ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas pancasakti Tegal yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulis untuk dapat menyusun skripsi ini.
6. Ayahanda Dulhadi dan Ibunda Umiyati, selaku orang tua serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan proposal ini.
7. Teman-teman kelas akuntansi E, Dinas koperasi dan UMKM Kota Tegal, para UMKM selaku responden, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, doa, bantuan serta dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya. *Amin yarobbal'alam.*

Tegal, Juli 2020

Tri Mustikasari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	xiv
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Landasan Teori .....	9
1. Pajak .....	9
2. Kepatuhan wajib pajak UMKM .....	19
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	22
4. Self Assesment System.....	23
5. Omzet penghasilan .....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Pemikiran Konseptual .....	28
D. Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN .....	34
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Populasi dan Sampel .....	34
C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel .....	35
1. Definisi Konseptual.....	35
2. Definisi Operasional variabel .....	36
D. Metode Pengumpulan Data .....	38
E. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen penelitian .....	39
1. Uji Validitas.....	39
2. Uji Reabilitas .....	40
F. Metode Analisis Data.....	40
1. Statistik Deskriptif .....	40
2. Uji Asumsi Klasik .....	41
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	43
4. Uji signifikan parsial (Uji t).....	43
5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Sejarah Kota Tegal.....	45
2. Visi dan Misi Kota Tegal.....	46
3. Struktur organisasi pemerintah Kota Tegal.....	41
B. Gambaran Umum Responden .....	47
C. Analisis Data .....	52
1. Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	52
2. Uji Asumsi Klasik .....	59
3. Analisis Regresi Berganda.....	62
D. Pembahasan .....	66
BAB V PENUTUP .....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
C. Keterbatasan Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN .....	73

## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Tarif Pajak WPOP .....	16
Table 2.2 Penelitian Terdahulu .....	29
Table 3.1 Operasional Variabel .....	34
Table 3.2 Skor Jawaban Responden .....	37
Table 4.1 Distribusi Penyebaran Kuisisioner .....	46
Table 4.2 Jenis Kelamin .....	46
Table 4.3 Umur .....	47
Table 4.4 Pendidikan .....	48
Table 4.5 Lama Usaha .....	49
Table 4.6 Penghasilan Perbulan .....	50
Table 4.7 Uji Validitas PP No 23 tahun 2018 .....	52
Table 4.8 Uji Validitas Self Assesment System .....	53
Table 4.9 Uji Validitas Omzet Penghasilan .....	54
Table 4.10 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	55
Table 4.11 Uji Reliabilitas .....	56
Table 4.12 Descriptive Statistics .....	51
Table 4.13 One sampel Kolmogorov-Smirnov Test .....	57
Tabel 4.14 Uji Multikolonieritas .....	58
Table 4.15 Regresi Linier Berganda .....	60
Table 4.16 Uji Parsial (Uji t) .....	63
Table 4.17 Koefisien Determinasi .....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	35
Gambar 4.2 Struktur organisasi pemerintah Kota Tegal.....	41
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner .....	74
Lampiran 2 Data Penelitian Variabel PP No 23 tahun 2018.....	79
Lampiran 3 Data Penelitian Variabel Self Assesment System.....	82
Lampiran 4 Data Penelitian Variabel Omzet Penghasilan .....	85
Lampiran 5 Data Penelitian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	88
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas PP No 23 tahun 2018.....	91
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas Self Assesment System.....	92
Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Omzet Penghasilan.....	93
Lampiran 9 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	94
Lampiran 10 Hasil Uji Reliabilitas .....	95
Lampiran 11 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	96
Lampiran 12 Surat Ijin Penelitian.....	99

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai Negara berkembang, senantiasa melakukan pembangunan disegala bidang sebagai wujud pemenuhan kewajibannya kepada rakyat Indonesia yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintah, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan Negara. Untuk memenuhi kewajiban Negara kepada rakyat maka Negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan Negara sebagai sumber pendapatan Negara. Sedikitnya, Negara Indonesia memiliki tiga sumber pembiayaan, yaitu : pinjaman luar maupun dalam negeri, penjualan sumber daya alam dan pajak.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan Negara yang mencapai 86,5% dari target APBN tahun 2019. Dari sektor pajak, pemerintah Indonesia dalam hal ini mengatur perpajakan sesuai dengan fungsinya, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu penerimaan pajak Indonesia adalah pajak dari sector usaha mikro kecil dan menengah.



UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Dan juga menyumbang PDB sekitar 60%. Peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor, yaitu : penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi local dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. (LPPI, 2015)

Pertumbuhan UMKM sangat pesat setiap tahunnya, Departemen koperasi dan UMKM nasional menyatakan perkembangan terakhir tercatat hingga tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 64.194.057 unit setelah terjadinya krisis justru UMKM malah terus mengalami kenaikan. (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2018)

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan

pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan serta memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentunya mengindikasikan tarif pajak diduga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga memicu pemerintah untuk melakukan perubahan atas tarif pajak final untuk UMKM dengan mengurangi tarif yang ada. (Widodo, Djefris, & Wardhani, 2010)

Pada pertengahan tahun 2018 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 untuk menggantikan peraturan lama yaitu PP No.46 tahun 2013. Pemerintah mengeluarkan PP No.23 tahun 2018 ini dikarenakan banyak pelaku-pelaku UMKM yang menganggap bahwa tarif yang diatur di peraturan lama yaitu PP 46 tahun 2013 dinilai terlalu tinggi, serta WP UMKM cenderung untuk tidak berkeinginan mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi, dan banyak UMKM yang merasa bahwa tidak ada kompensasi kerugian di peraturan ini, sehingga maupun usahanya mengalami laba atau rugi maka tetap dikenakan pajak 1% dari omzet.

Maka dari itu, pada bulan juli tahun 2018 pembayaran pajak untuk WP UMKM diatur dalam peraturan baru yaitu PP 23 tahun 2018 tentang “pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu” yang dijelaskan pada pasal 2 ayat

1 dan 2 bahwa WPOP atau WP badan yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto (PB) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta) dalam 1 tahun pajak, maka dikenakan tarif 0,5% dari PB. Sifat pengenaan pajak atas peraturan ini masih sama dengan peraturan sebelumnya yaitu bersifat final.

Salah satu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah system pemungutannya itu sendiri. Bila dahulu system pemungutan pajak hanya mengenal *Official Assesment System* yang memberikan wewenang pemerintah (fiskus) untuk penentuan pajak terutang dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak, maka sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983 (tax reform) system pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assesment System*.

*Self Assessment System* memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. (Resmi, 2011)

Omzet penghasilan dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak cenderung menyembunyikan Omzet Penghasilannya. Hal

ini karena semakin tinggi Omzet Penghasilan maka akan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

Di Indonesia fenomena yang terjadi sejak diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 dalam situs majalah pajak menyatakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak dari sector UMKM meningkat secara signifikan setiap tahun. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat, jumlah wajib pajak dari kalangan pelaku UMKM tahun 2013 yang membayar Pph Final sebanyak 220.000 dengan nilai Rp 424 miliar. Pada tahun 2014, angka ini meningkat 400 persen dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebanyak 532.000 dan nilai sebesar Rp2,2 triliun. Di tahun 2015, WP di sector UMKM yang membayar pajak sebanyak 780 dengan nilai Rp 3,5 triliun. Angkanya terus meningkat di tahun 2016 dengan jumlah WP 1,45 juta dan setoran sebesar RP 4,3 triliun. Pada 2017 jumlah WP disektor UMKM telah mencapai 1,5 juta dengan setoran Rp 5,8 triliun. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, kontribusi penerimaan pajak dari sector UMKM di tahun 2018 sekitar 5,7 triliun. Angka itu masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional yang sebesar 1500 triliun. (Majalah Pajak, 2019)

Beberapa penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak UMKM sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Yuliyannah, 2018) dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak sebesar 1% itu terlalu besar dan memberatkan mereka sehingga mengurangi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. (Maharani, 2015) dengan hasil penelitian variabel *self assessment system*

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil penelitian (Anggara & Sulistiyanti, 2017) terjadi perbedaan, bahwa omzet penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Yuliyannah, 2018) menyatakan bahwa omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018, *Self Assesment System* Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Tegal”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh positif penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah terdapat pengaruh positif *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah terdapat pengaruh positif Omzet Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Untuk mengetahui pengaruh positif *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif Omzet Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan sebagai pengembangan pada perpajakan sektor UMKM. Serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan peraturan perpajakan yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan Negara pada sektor pajak UMKM.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta penyumbang konseptual bagi peneliti selanjutnya khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Aspek Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan khususnya yang menyangkut tentang pajak para pelaku UMKM serta sebagai upaya untuk melatih berfikir secara ilmiah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada.

b. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM.

c. Bagi KPP Pratama Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi serta masukan mengenai tindakan yang dapat diambil guna mengetahui tentang pengaruh penerapan PP No.23 tahun 2018, *self assessment system*, omzet penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 dalam (Mardiasmo, 2016) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2016)

Menurut (Resmi, 2011) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro (1993) dalam (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan iuran rakyat kepada khas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau Kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2016)



Sehubungan dengan pengertian diatas maka (Mardiasmo, 2016) memberikan kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara Maksudnya yaitu yang berhak memungut pajak kepada rakyat hanyalah Negara. Iuran tersebut bukan berupa barang atau hal lain melainkan berupa uang.
2. Berdasarkan Undang-Undang. Yakni pajak akan dipungut berdasarkan atas kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi msyarakat luas.

a. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur.

(Mardiasmo, 2016) menyatakan berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut :

1) Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

b. System pemungutan pajak

Menurut (Resmi, 2011) dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

System pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi,

dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- a) Menghitung sendiri pajak terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri peranan dominan ada pada wajib pajak.

### 3) *With Holding System*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

c. Pajak penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 pasal 4, salah satu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 pasal 14 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Norma perhitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada direktorat jenderal pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

d. Penghasilan kena pajak

Berdasarkan undang-undang perpajakan pasal 17 tentang penghasilan kena pajak (2013;64) yang berlaku hingga saat ini. Berikut

adalah tariff pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi beberapa masing-masing wajib pajak :

1) Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak WPOP**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

*Sumber : Undang-Undang Perpajakan 2013*

2) Poin kedua dari Undang-Undang perpajakan pasal 17 tentang PKP yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarifnya adalah sebesar 28%. Lalu mengalami perubahan pada tahun 2010 mulai diterapkan menjadi 25%. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dan memiliki paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor serta diperdagangkan di bursa efek Indonesia serta memenuhi persyaratan tertentu lainnya, maka dapat memperoleh diskon tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif sebenarnya atau 20%.

e. Penghasilan tidak kena pajak

Atas dasar peraturan menteri keuangan tahun 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak, pasal 1 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Rp 54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- 2) Rp 4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak kawin;
- 3) Rp 54.000.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- 4) Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

f. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) merupakan salah satu penyumbang pajak bagi suatu Negara, khususnya Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) di definisikan bahwa :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300 juta dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50 juta.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan anatara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5

miliar dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500 juta.

Menurut (LPPI, 2015) klasifikasi UMKM dalam perspektif usahanya dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut :

- 1) UMKM pada sektor informal, yaitu contohnya seperti pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro merupakan para UMKM dengan kemampuan memiliki sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Usaha kecil dinamis merupakan UMKM yang memiliki kemampuan berwirausaha dengan menjali kerjasama ( dapat menerima pekerjaan sub kontrak) dan juga ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise* merupakan UMKM yang mempunyai kemampuan kewirausahawan yang cakap atau baik dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Kelemahan dan kelebihan usaha mikro kecil dan menengah

Perusahaan skala kecil dan menengah memiliki kelebihan sebagai berikut :

1. Tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan oleh inflasi maupun berbagai factor penyebab lainnya.
2. Tanpa subsidi dan proteksi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mampu menambah nilai devisa bagi Negara.
3. Mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kelas bawah
4. Kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan dan penyerapannya terhadap tenaga kerja.
5. Independen dalam menentukan harga produksi atas barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan.
6. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah-ubah.
7. Prosedur hukum yang sederhana.
8. Pajak relative ringan, sebab yang dikenakan pajak adalah pengusahanya bukan perusahaannya.
9. Mudah dalam proses pendirian
10. Mudah untuk dibubarkan.
11. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
12. Pemilik memiliki seluruh laba.
13. Mempunyai kecenderungan untuk bertahan.



14. Relative tidak membutuhkan investasi besar dan sarana produksi lainnya yang tidak terlalu mahal.
15. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.
16. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreativitas pengelola.
17. Terbukanya peluang dengan adanya berbagai kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah.

Sedangkan kelemahan dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Umumnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak pernah dilakukan study kelayakan, penelitian pasar, analisis perputaran uang tunai atau kas serta penelitian lainnya hanya diperlukan dalam suatu aktivitas bisnis.
2. Tidak mempunyai perencanaan jangka panjang, system akuntansi yang memadai, anggaran kebutuhan modal, struktur organisasi dan pendelegasian wewenang serta alat-alat manajerial lainnya (perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha)
3. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai kekurangan dalam informasi.
4. Kurangnya petunjuk teknis operasional kegiatan dan pengawasan mutu hasil kerja dan produk.

5. Pembagian kerja pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak proporsional, sering terjadi pengelola memiliki pekerjaan yang melimpah dan karyawan yang bekerja diluar batas jam kerja standar.
6. Kesulitan mengetahui kebutuhan modal kerja (mardiasmo, 2016)
7. Sering terjadi kelebihan persediaan yang tidak laku.
8. Resiko dan hutang-hutang ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik.
9. Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik dan kesempatan mendapatkan kredit dari bank sangat kecil.

## **2. Kepatuhan wajib pajak UMKM**

### **a. Pengertian kepatuhan wajib pajak**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh kepada peraturan atau pada ajaran. Aturan yang dimaksud di dalam perpajakan adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan perpajakan itu bisa diartikan sebagai situasi dimana wajib pajak patuh atau taat dalam melaksanakan membayar pajaknya atau tidak dengan sengaja melanggar dari peraturan perpajakan yang sudah berlaku.

Menurut Nurmantu (2003) dalam (Widodo, Djefris, & Wardhani, 2010) kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Mardiasmo, 2016) mengatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak serta pemungut pajak, memiliki hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 192/PMK.03/2007 pasal 1 menyebutkan bahwa patuhnya wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT).
- 2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapatkan izin mengansur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 3) Laporan keuangan audit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5(lima) tahun terakhir.

b. Indikator kepatuhan wajib pajak

Menurut (Andayani, 2018) kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 indikator yaitu :

- 1) Tepat waktu dalam pelaporan SPT

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud tepat waktu yaitu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat

waktu sebelum batas akhir dan mengisinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Tepat waktu dalam pembayaran serta mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) undang-undang no. 28 tahun 2007 setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor direktorat jendral pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan jelas

Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan jelas adalah setiap wajib pajak wajib membayarkan kekurangan pajaknya sebelum dilakukannya pemeriksaan dan menghitung kekurangan pajaknya dengan benar dan jelas.

- 4) Tidak pernah tunggakan pajak

Pasal 3 ayat (1) undang-undang No. 28 tahun 2007 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak pernah tunggakan pajak adalah wajib pajak yang tidak memiliki daftar tunggakan pajak untuk jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir.

### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

#### **a. Pengertian PP No 23 Tahun 2018**

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak terutama dari sektor UMKM adalah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh kedalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang mulai diberlakukan per tanggal 1 juli 2018.

Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 2018 menjelaskan tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun dengan pengenaan tarif 0,5% dari peraturan yang sebelumnya (PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1%). Penurunan tarif ini diharapkan dapat menutupi biaya operasional UMKM yang semakin hari dirasa semakin berat. Hal ini mengerucut pada meningkatnya profit dan meningkatkan gairah usaha khususnya UMKM

#### **b. Indikator penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018**

Penelitian ini mengukur penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 menggunakan indikator sebagai berikut

- 1) Pengetahuan wajib pajak terkait ketentuan umum PP Nomor 23 Tahun 2018 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan.
- 2) Sikap wajib pajak terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya penerapan PP No. 23 Tahun 2018

- 3) Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 23 Tahun 2018 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

#### **4. Self Assesment System**

##### **a. Pengetrian *Self Assessment System***

*Self Assessment System* adalah system dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh Undang-Undang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Manuputty & Sirait, 2016)

(Mardiasmo, 2016) mengatakan bahwa *Self Assessment System* suatu system pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutangnya. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
- 2) Wajib pajak aktif, yaitu wajib pajak melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- 3) Peran fiskus hanya mengawasi tidak ikut campur dalam hal apapun.

##### **b. Indikator *Self Assessment System***

Penelitian ini diukur menggunakan indikator menurut (Mardiasmo, 2016) untuk mengukur bagaimana implementasi *Self Assessment System* yaitu sebagai berikut :

- 1) Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, artinya wajib pajak tahu dan mengerti bagaimana system pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia serta bertanggung jawab atas kewajibannya.
- 2) Tanggung jawab dalam pengelolaan pajaknya, artinya wajib pajak bertanggung jawab atas semua pengelolaan pajak terutang yang ia kelola sendiri.
- 3) Wajib pajak tahu cara menghitung jumlah pajak yang akan dikenakan pada penghasilan yang diterimanya.
- 4) Wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangnya, artinya wajib pajak melakukan perhitungan sendiri secara mandiri tentang seberapa besar pajak terutang yang harus dia bayar.
- 5) Wajib pajak membayar sendiri pajak terutangnya, artinya wajib pajak melakukan pembayaran secara mandiri pajak terutangnya.
- 6) Wajib pajak melaporkan sendiri SPT dan pajak terutangnya.
- 7) Peran fiskus (pemerintah) dalam proses implementasi *Self Assessment System*, baik dalam proses edukasi masyarakat melalui sosialisasi maupun dalam penyelenggaraa pelayanan.
- 8) Pemantauan oleh fiskus, artinya peran (pemerintah) dalam proses penerapan *Self Assessment System* juga melakukan pemantauan untuk melihat perkembangan serta membantu apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam penerapan *Self Assessment System*.

- 9) Fiskus membantu wajib pajak yang kesulitan dalam mempraktekan *System Self Assessment*.

## 5. Omzet penghasilan

### a. Pengertian Omzet Penghasilan

Omzet menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008) adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual.

(Anggara & Sulistiyanti, 2017) menyatakan omzet penghasilan adalah seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan.

Jadi, Omzet penghasilan adalah jumlah pendapatan atau jumlah yang diterima oleh wajib pajak dalam kurun waktu tertentu, dan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima secara terus menerus dalam satu proses akuntansi.

Dalam penelitian ini peneliti berasumsi bahwa omzet yang UMKM terima akan mencapai maksimal apabila para UMKM menerapkan pembukuan serta menata kinerja keuangan dengan baik.

### b. Indikator Omzet Penghasilan

Variable ini diukur menggunakan indikator menurut (Yuliyannah, 2018)



- 1) Penghasilan merupakan objek pajak, artinya wajib pajak umkm paham dan setuju bahwa berapapun omzet penghasilan yang mereka terima merupakan objek pajak.
- 2) Kemauan wajib pajak dalam mematuhi peraturan pph final artinya adalah wajib pajak umkm memahami serta mematuhi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan umkm yaitu diterapkannya pph final bagi umkm dengan penghasilan tertentu.
- 3) Membayar pajak berdasarkan omzet, yaitu saat ini wajib pajak membayar pajak berdasarkan omzet yang mereka terima, tidak mengacu pada pph final atau pph pasal 4 ayat 2.
- 4) Omzet yang tinggi maka pajaknya juga tinggi, artinya pembayaran pajak terutang tergantung pada setiap kenaikan omzet yang diterima wajib pajak umkm setiap tahunnya.
- 5) Kebenaran dalam penyampaian penghasilan artinya wajib pajak umkm secara transparan dengan jujur menghitung, dan melaporkan omzet besar kecilnya omzet dengan benar.
- 6) Membuat pembukuan untuk menghitung omzet, umkm melakukan pembukuan guna untuk melihat dan menghitung omzet yang mereka terima.
- 7) Semakin lama umkm berdiri maka kualitas produknya, artinya semakin lama umkm tersebut berdiri maka akan meningkat kualitas produk Karena terus melakukan perbaikan.

- 8) Semakin lama umkm berdiri maka semakin tinggi pula omzet artinya semakin lama umkm berdiri maka penghasilan yang diterima oleh wajib pajak umkm semakin tinggi juga.
- 9) Semakin lama umkm berdiri maka semakin baik pula dalam penguasaan pasar serta perkembangan teknologi yang ada.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Alat Analisa	Hasil Penelitian
1.	Ety Meikhati, Sufia Widi Kasetyaningsih (2019)	Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM	Analisis Regresi Linier Berganda	Variable Pp No 23 Tahun 2018 (X) Dalam Penelitiannya, Memberikan Hasil Bahwa Penerapan UU No 23 tahun 2018, yang menjadikan penurunan pajak dari 1% menjadi 0,5% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.
2.	(Palalangan, Pakendek, & Tangdialla, 2019)	Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Makassar	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan penerapan PP No.23 Tahun 2018 wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3.	(Listyaningsih,	Implementasi PP Nomor 23 Tahun	Analisis Regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Nurlaela, & R Dewi, 2019)	2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Surakarta	Linier Berganda	implementasi PP Nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	---------------------------------	--	--------------------	---

Dilanjutkan

## Lanjutan

4.	(Noviana, Afifudin, & Hariri, 2020)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang)	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Variabel Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang
5.	Inggrid Grace Manuputty, Swanto Sirait (2016)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian Ini Menyimpulkan Bahwa Penerapan <i>Self Assesment System</i> Secara Parsial Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Tetapi Secara Simultan Berpengaruh Secara Signifikan.
6.	S Mia Lasmaya, Neni Nur Fitriani (2017)	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Sederhana	Dalam Penelitian Ini Meyatakan Bahwa <i>Self Assesment System</i> Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
7.	Septiana Daniska Saputri (2015)	Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Surakarta	Analisis Regresi Linier Berganda	Variable Penerapan <i>Self Assessment System</i> Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Surakarta

Dilanjutkan

## Lanjutan

8.	(Maharani, 2015)	Pengaruh Self Assesment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan Hasil Penelitian disimpulkan bahwa Self Assessment System Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Pekanbaru
9.	Diyan Sulastika Rizajayanti (2017)	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Analisis Regresi Linier Berganda	Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa variable Omzet Penghasilan tidak memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Pekanbaru.
10.	Aditya Budi Anggara dan Umi Sulistiyanti (2017)	Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta	Analisis Regresi Linier Berganda	Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Omzet Penghasilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
11.	Nerissa Arviana dan arja sadjiarto 2014	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Social serta Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014	Analisis Regresi Linier Berganda	Variable penghasilan atau omzet sebagai (X2) dalam penelitiannya, memberikan hasil bahwa omzet berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di mojokerto.
12.	(Yuliyannah, 2018)	Pengaruh omzet penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assesment System terhadap kepatuhan pajak UMKM	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa omzet penghasilan (X1) dan self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wp umkm

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam menganalisis pengaruh penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, *self assessment system*, omzet penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019) dengan variable independen PP No 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lasmaya & Fitriani, 2017) dengan variable independen *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rizajayanti, 2017) dengan variable independen pemahaman peraturan, omzet, kualitas pelayanan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti menggabungkan dari ketiga variabel independen tersebut yaitu PP No.23 tahun 2018, *Self assessment system* dan Omzet penghasilan. Selain itu perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada tahun, sampel dan objek penelitian. Objek penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Tegal pada tahun 2020.

### **C. Kerangka Pemikiran Konseptual**

Penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, dan variable independen meliputi, penerapan PP No 23 Tahun 2018, *Self Assessment System*, serta Omzet Penghasilan.

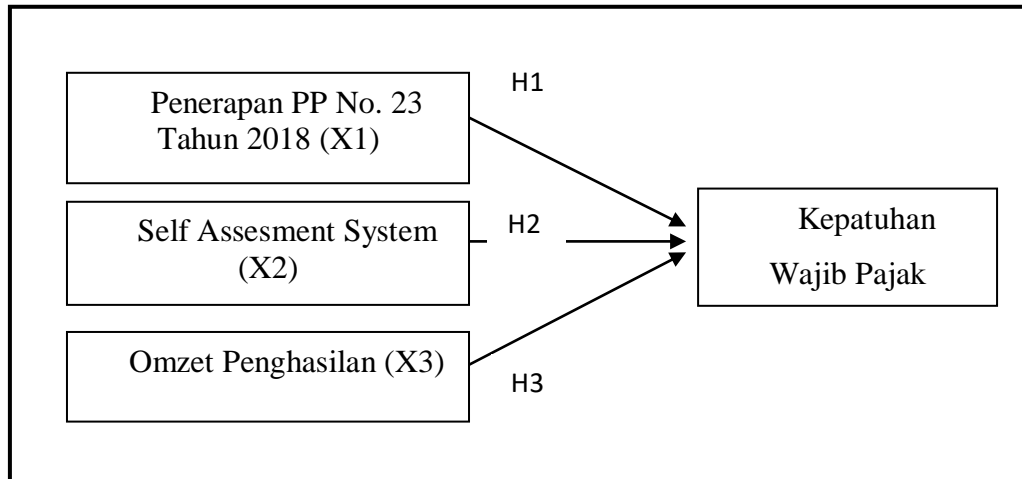
Penelitian yang dilakukan (Palalangan, Pakendek, & Tangdialla, 2019) menyatakan hasil bahwa variable penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X1)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan (Noviana, Afifudin, & Hariri, 2020) memberikan hasil bahwa variable penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (Y) di Kabupaten Sampan. Hal ini tentu sesuai dengan harapan pemerintah bahwa dengan di berlakukannya PP No 23 Tahun 2018 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar akan dikenakan tarif 0,5 % dari peraturan yang sebelumnya (PP No. 46 Tahun 2013) dengan tarif 1%).

Penelitian yang dilakukan (Maharani, 2015) menyatakan bahwa penerapan *Self Assessment System* (X2) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Manuputty & Sirait, 2016) yang menyatakan bahwa variable *Self Assessment System* (X2) berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan (Yuliyannah, 2018) memberikan hasil bahwa variable Omzet Penghasilan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sesuai dengan yang telah diharapkan oleh peraturan perpajakan yang menyatakan semakin tinggi Omzet Penghasilan maka diharapkan semakin patuh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Rizajayanti, 2017) dan (Anggara & Sulistiyanti, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Omzet Penghasilan (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

(Y), hal ini mungkin disebabkan karena semakin tinggi omzet penghasilan maka akan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar, sehingga wajib pajak merasa terbebani dengan pajak tersebut.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### **D. HIPOTESIS**

H1 : Penerapan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal.

H2 : *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal.

H3 : Omzet Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha menganalisis pengaruh pp no.23 tahun 2018, *self assessment system* dan omzet penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm Kota Tegal dengan menggunakan analisis statistik SPSS versi 23.

##### B. Populasi dan Sampel

Menurut (Sekaran, 2016) menyatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian atau suatu hal yang ingin peneliti investigasi. Berdasarkan hal tersebut maka populasi atau objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang berada di Kota Tegal yaitu sebanyak 204.950 UMKM.

Sampel adalah suatu hal yang dapat mewakili suatu populasi dan merupakan bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Probability Sampling* dengan metode *Simple Random Sampling* yang dipilih, dalam menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin.

Berikut adalah perhitungan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1+N\epsilon^2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Maka } (n) &= 204.950 / (1 + 204.950 (0,1)^2) \\
 &= 204.250 / 2.050,5 \\
 &= 99,61 / 100 \text{ sampel.}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance)

### **C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel**

#### **1. Definisi Konseptual**

##### **a. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)**

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan isi dalam Undang-Undang perpajakan. Fokus wajib pajak dalam penelitian ini adalah pada sektor UMKM. (Anggara & Sulistiyanti, 2017)

##### **b. Penerapan PP No 23 Tahun 2018 (X1)**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No.46 Tahun 2013 dengan tariff PPh final UMKM sebesar 1% yang dihitung berdasarkan

pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. (Tatik, 2018)

*c. Self Assesment System*

Menurut (Mardiasmo, 2016) *Self Assesment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk berperan aktif dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutanganya, tanpa campur tangan dari fiskus.

*d. Omzet Penghasilan*

Omzet penjualan adalah seluruh jumlah penjualan suatu produk barang atau jasa yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, dan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima secara terus menerus dalam suatu proses akuntansi. (Anggara & Sulistiyanti, 2017)

## 2. Definisi Operasional variabel

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) (Andayani, 2018)	1. Tepat Waktu 2. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku	a. Tepat waktu dalam pelaporan SPT b. Tepat waktu dalam pembayaran serta mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan jelas d. Tidak pernah tunggakan pajak.	Interval

Dilanjutkan

## Lanjutan

Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2018 (X1) (Palalangan, Pakendek, & Tangdialla, 2019)	1. Pengetahuan perubahan PP No. 23 Tahun 2018. 2. Tarif pajak yang ditetapkan untuk wajib pajak UMKM	3. Pengetahuan wajib pajak terkait ketentuan umum PP No 23 Tahun 2018 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan 4. Sikap wajib pajak terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya penerapan PP No 23 Tahun 2018 5. Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No 23 Tahun 2018 baik dalam tata cara perhitungan maupun dalam pelunasannya.	Interval
Self Assesment System (X2) (Mardiasmo, 2016)	1. Wajib Pajak menentukan pajak sendiri	a. Kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan b. Memahami cara perhitungan penentuan pajak terutangnya	Interval
	2. Wajib pajak aktif	a. Wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangnya b. Wajib pajak melaporkan sendiri pajak terutangnya. c. Wajib pajak membayar sendiri pajak terutangnya.	Interval
	3. Peran fiskus	a. Fiskus memberikan edukasi atau sosialisasi kepada wajib pajak. b. Fiskus memantau jalannya penerapan system <i>Self Assesment System</i> .	Interval
Omzet Penghasilan (X3) (Yuliyannah, 2018)	1. Penghasilan adalah objek pajak	a. Berapapun penghasilan merupakan objek pajak b. Kemauan wajib pajak dalam penerapan peraturan pph final. c. Membayar pajak berdasarkan jumlah omzet.	Interval
	2. Jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak UMKM	a. Semakin besar omzet penghasilan maka semakin tinggi pajak terutangnya. b. Ketransparanan wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajak terutangnya. c. Membuat pencatatan dalam menghitung omzet.	Interval

Dilanjutkan

Lanjutan

	3. Umur Usaha/ UMKM pada penghasilan an UMKM	a. Semakin lama UMKM berdiri semakin baik kualitas produk yang dijual. b. Semakin lama UMKM berdiri maka semakin tinggi omzet penghasilan.	Interval
--	---	---	----------

#### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner yang langsung diberikan kepada responden yaitu wajib pajak umkm yang ada di Kota Tegal. Kuesioner yang sudah diisi oleh responden diteliti terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Penelitian ini memilih cara demikian dengan pengembangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala *Likert*. Skala *Likert* alat atau cara untuk mengukur pendapat, persepsi dan sikap seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Dengan skala *Likert* maka variable yang diukur kemudian dijabarkan menjadi indikator variable. Kemudian jawaban setiap item yang menggunakan skala *Likert* memiliki nilai dari sangat positif sampai sangat negative, seperti yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2007) sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Skor Jawaban Responden**

No	Uraian	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

## **E. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen penelitian**

### **1. Uji Validitas**

Validitas adalah kemampuan dari kuesioner untuk mengukur secara aktual apa yang seharusnya diukur dan tidak ada kesalahan dalam penarikan kesimpulan data. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner pengukuran. Dimana kuesioner dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang semestinya diukur atau mampu mengukur apa yang ingin dicari secara tepat (Ghozali, 2018).

Ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut dapat menjalankan alat fungsi ukurnya atau memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan maksud pengukuran tersebut. Metode yang sering digunakan untuk memberikan penilaian dengan validitas kuesioner adalah korelasi product moment (moment product correlation, pearson correlation). Dari perhitungan tersebut dapat diketahui validitas masing-masing butir pertanyaan. Butir

pertanyaan tersebut dikatakan valid jika  $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$  namun apabila butir pernyataan tersebut dikatakan tidak valid apabila  $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$ .

## 2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah instrument untuk mengukur ketepatan, keterandalan, *consistency*, *stability* atau *dependability* terhadap kuesioner. Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun benar-benar merupakan hasil yang baik, reabilitas atau keandalan. Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya apabila alat ukur yang digunakan stabil, dapat diandalkan, dan dapat digunakan dalam peramalan. Artinya data yang dikatakan realibilitas adalah alat ukur yang digunakan bisa memberikan hasil yang sama walaupun digunakan berkali-kali oleh peneliti yang berbeda (Ghozali, 2018). Pengujian reliabilitas menggunakan teknik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan *reliabel* jika menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar daripada 0,70 ( $> 0,7$ ). Jika nilai *Cronbach Alpha*  $< 0,70$  maka pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel yang diamati tidak *reliabel*.

## F. Metode Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang mendeskriptifkan suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, *variance*, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2018). Analisis data

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum akan dilakukannya pengujian Analisis Regresi Linier Berganda, maka akan terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap data yang akan diolah dalam penelitian ini meliputi beberapa pengujian sebagai berikut :

### a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Jadi dalam hal ini yang diuji normalitas bukan masing-masing variabel independen dan dependen tetapi nilai residual yang dihasilkan oleh model regresi. Cara untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak maka dapat menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Sedangkan untuk menguji kenormalan distribusi datanya dapat menggunakan uji statistic *Kolmogorov-Smirnov Test*. Dapat dikatakan normal apabila nilainya signifikan  $> 0,05$

### b. Uji Multikolinearitas

(Ghozali, 2018) menyebutkan bahwa uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) model regresi yang bagus sebaiknya tidak terjadi korelasi antara varabel idependen. Apabila variabel independen ini saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini



tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menjelaskan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Di dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan digregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabelitas variabel independen yang terpilih tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Maka nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cut off* yang umum dapat dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloniaritas adalah nilai  $Tolerance \leq 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ .

Berdasarkan aturan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance* dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Jika nilai VIF lebih dari angka 10 atau nilai *tolerance* kurang dari 0.10 maka dikatakan terjadi gejala multikolinearitas.
- b) Jika nilai VIF kurang dari angka 10 atau nilai *tolerance* kurang dari 0.10 maka dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.
- c. Uji Heteroskedastisitas

(Ghozali, 2018) berpendapat bahwa uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika

varians dari residual suatu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Secara umum perhitungan yang mempengaruhi Y adalah  $X_1 X_2 X_3 \dots X_n$ , jadi menurut rumus regresi linier berganda dengan pengolahan statistika computer yaitu SPSS adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y : Kepatuhan wajib pajak UMKM

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_{123}$  : Koefisiensi Regresi

$X_1$  : Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018

$X_2$  : *Self Assesment System*

$X_3$  : Omzet Penghasilan

$\varepsilon$  : *Term of error*

### 4. Uji signifikan parsial (Uji t)

Uji signifikan parsial (Uji T), uji ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh variabel terikat secara parsial (individu). Dengan kata lain pengujian ini dilakukan untuk melihat keberartian dari masing-masing

variabel secara terpisah (parsial) terhadap variabel tidak bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dengan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar lima persen (2,5%), dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ ,  $\alpha = 0,025$ , maka Hipotesis diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $\alpha = 0,025$ , maka Hipotesis ditolak, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

## 5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut (Ghozali, 2018) koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinan untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (*time series*) juga biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kota Tegal**

Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Sumber lain menyatakan, nama Tegal berasal dari kata Teteguall. Sebutan yang diberikan seorang pedagang asal portugis yaitu Tome Pires pada tahun 1500-an. Melihat kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran pengairan. Daerah yang sebagian besar merupakan tanah lading tersebut kemudian dinamakan Tegal. Atas jasanya Ki Gede Sebayu diangkat menjadi pemimpin Kota Tegal pada tanggal 12 April 1580 yang juga menjadi hari jadi Kota Tegal.

Kota Tegal Terletak diantara  $109^{\circ}08'$  -  $109^{\circ}10'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}50'$  -  $6^{\circ}53'$  Lintang selatan, dengan wilayah seluas 39,68 Km<sup>2</sup> atau kurang lebih 3.968 Hektar. Luas Wilayah Kota Tegal, relatif kecil yaitu hanya 0,11 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara Administrasi Wilayah Kota Tegal terbagi dalam 4 Kecamatan dan 27 Kelurahan, dengan batas administratif sebagai berikut sebelah Utara adalah laut Jawa, sebelah Selatan dan Timur adalah Kabupaten Tegal dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

## **2. Visi dan Misi Kota Tegal**

### **a. Visi**

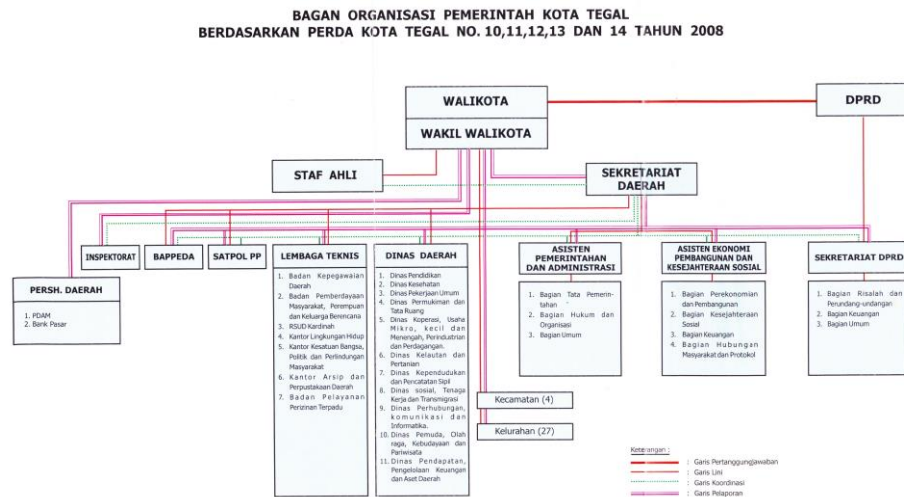
Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima

### **b. Misi**

- a. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN.
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi local.
- d. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk penggunaan berkelanjutan.
- e. Mewujudkan kesatuan social serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan partisipasi masyarakat.

### 3. Struktur Organisasi Kota Tegal

Struktur organisasi Kota Tegal adalah sebagai berikut



**Gambar 4.1**  
**Struktur organisasi pemerintah Kota Tegal**

Sumber : Website Pemerintah Kota Tegal

### B. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tegal pada bulan Juni-Juli 2020. Responden dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdapat di Kota Tegal yang memiliki peredaran bruto kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 miliar. Peneliti menyebar sebanyak 100 Kuisisioner . dari 100 kuisisioner yang disebar, 100 kuisisioner diterima kembali.

**Tabel 4.1****Distribusi Penyebaran Kuesioner**

No	Kuesioner	Juml	Presentase
1	Kuesioner yang dikirim	100	100%
2	Kuesioner yang kembali	100	100%

Sumber : Data kuisioner yang diolah, 2020

Dari 100 (100%) kuesioner yang disebar, 100 (100%) kuesioner diterima kembali. Dari kuesioner yang kembali, data yang diperoleh nantinya akan diolah untuk menguji hipotesis.

**a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin**

Pembagian responden berdasarkan jenis kelamin terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Berikut deskripsi jumlah responden berdasarkan jenis kelamin.

**Table 4.2****Jenis\_Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-	52	52.0	52.0	52.0
	PEREMP	48	48.0	48.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Dari table diatas diperoleh informasi bahwa sebanyak 52 responden berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebanyak 48 responden berjenis kelamin perempuan.

### b. Deskripsi responden berdasarkan umur

Table dibawah ini adalah gambaran responden berdasarkan umur. Pembagian responden berdasarkan umur dibagi menjadi 3 kategori yaitu kurang dari 30 tahun, 30 tahun sampai dengan 40 tahun, dan lebih dari 40 tahun.

**Tabel 4.3**

#### Umur

			Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	dibawah 30		26	26.0	26.0	26.0
	30-40 tahun		37	37.0	37.0	63.0
	dias 40 tahun		37	37.0	37.0	100.0
	Total		100	100.0	100.0	

Sumber ; Olah data SPSS, 2020

Dari table diatas diperoleh informasi bahwa jumlah responden yang berumur 30-40 tahun dan responden yang berumur diatas 40 tahun memiliki jumlah yang sama yaitu 37 atau 37% dan sebanyak 26 atau 26% responden yang berumur dibawah 30 tahun.

### c. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel dibawah ini adalah gambaran responden berdasarkan pendidikan terakhir. Pembagian responden berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir dibagi menjadi 4 kategori yaitu SLTA/ sederajat. Akademi (DI/DII/DIII), Strata satu (SI) dan lain-lain.



**Tabel 4.4**  
**Pendidikan**

	Frequency	Percent	Valid	Cumulative
SLTA/Sederajat	54	54.0	54.0	54.0
Akademi	7	7.0	7.0	61.0
Sarjana(S1Sederajat)	23	23.0	23.0	84.0
Lain-lain	16	16.0	16.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Dari table diatas diperoleh informasi bahwa mayoritas responden sebanyak 54,0% atau 54 responden berpendidikan terakhir SLTA/ sederajat, kemudian 23,0% atau 23 responden berpendidikan terakhir SI, kemudian disusul sebanyak 16,0% atau 16 responden berpendidikan terakhir lain-lain ada yang S2 ada yang SD dan lain-lain, dan terakhir sebanyak 7,0% atau 7 responden berpendidikan terakhir Akademi(DI/DII/DIII).

**d. Deskripsi responden berdasarkan lama usaha**

Tabel dibawah ini menjelaskan pembagian responden berdasarkan lama usha. Pembagian responden berdasarkan lama usaha dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori yaitu kurang dari 3 tahun, 3-10 tahun dan lebih dari 10 tahun

**Table 4.5**  
**Lama\_Usaha**

		Frequency	Percent	Valid	Cumulativ
Valid	<3 tahun	14	14.0	14.0	14.0
	3-10	63	63.0	63.0	77.0
	>10	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Dari table diatas diperoleh informasi bahwa mayoritas usia usaha atau lama usaha responden berdiri sebanyak 63 usaha atau 63.0% berumur 3-10 tahun, kemudian 23 usaha atau 23.0% berumur diatas 10 tahun, dan sisanya 14 usaha atau 14.0% berumur dibawah 3 tahun.

**e. Deskripsi responden berdasarkan keuntungan**

Tabel dibawah ini menjelaskan pembagian responden berdasarkan keuntungan yang mereka terima setiap bulan. Pembagian responden berdasarkan omzet dikategorikan menjadi 4 kelompok yaitu kurang dari Rp 3 juta per bulan, Rp 3 juta – 5 juta per bulan, Rp 5 juta – 10 juta per bulan dan lebih dari Rp 10 juta per bulan.

**Table 4.6**  
**Penghasila\_Perbulan**

	<b>Frequency</b>	<b>Percent</b>	<b>Valid Percent</b>	<b>Cumulative Percent</b>
Valid < Rp 3 juta	36	36.0	36.0	36.0
Rp 3 juta-Rp 5 juta	25	25.0	25.0	61.0
Rp 5 juta-Rp 10 juta	28	28.0	28.0	89.0
>Rp 10 juta	11	11.0	11.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Dari data diatas diperoleh informasi bahwa mayoritas keuntungan atau pendapatan yang responden terima setiap bulan kurang dari Rp 3 juta sebanyak 36 usaha atau 36.0%, yang mempunyai keuntungan Rp 5 juta – Rp 10 juta sebanyak 28 usaha atau 28.0%, kemudian yang mempunyai keuntungan Rp 3 juta – 5 juta sebanyak 25 usaha atau 25,0%, dan sisanya yang memiliki keuntungan diatas Rp 10 juta per bulan sebanyak 11 usaha atau 11.0%.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Hasil Uji Instrumen Penelitian**

##### **a. Uji Validitas**

##### **1) Uji Validitas PP No 23 tahun 2018**

Dalam pengukuran ini peneliti mengukur tingkat kevalidan kuisioner yang berjumlah 5 butir pernyataan. Setiap butir pernyataan

akan diuji tingkat validitasnya dengan menggunakan SPSS yang memberikan hasil seperti yang terdapat pada lampiran. Berikut adalah penjelasan dari hasil pengukuran variabel PP No 23 Tahun 2018.

**Table 4.7**  
**Uji validitas PP No 23 tahun 2018**

PP Nomor 23 tahun 2018	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,602	0,1966	Valid
2	0,755	0,1966	Valid
3	0,771	0,1966	Valid
4	0,729	0,1966	Valid
5	0,684	0,1966	Valid

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Berdasarkan uji validitas variabel PP No 23 tahun 2018 (X1) diperoleh nilai reliabilitas lebih besar dibandingkan dengan 0,1966. Maka dapat dikatakan variabel PP No 23 tahun 2018 dinyatakan valid.

## 2) Uji Validitas *Self Assesment Sytem*

Dalam pengukuran ini peneliti mengukur tingkat kevalidan kuisoner *Self Assesment System* yang berjumlah 5 butir pernyataan. Setiap butir pernyataan akan diuji tingkat validitasnya dengan menggunakan SPSS yang memberikan hasil seperti yang terdapat pada lampiran. Berikut adalah penjelasan dari hasil pengukuran variabel *Self assessment system*.

**Tabel 4.8**  
**Uji Validitas *Self Assesment System***

<i>Self Assesment System</i>	<b>R hitung</b>	<b>R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,604	0,1966	Valid
2	0,768	0,1966	Valid
3	0,815	0,1966	Valid
4	0,787	0,1966	Valid
5	0,702	0,1966	Valid

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Berdasarkan uji validitas variabel *Self Assesment System* (X2) diperoleh nilai reliabilitas lebih besar dibandingkan dengan 0,1966. Maka dapat dikatakan variabel *Self Assesment System* dinyatakan valid.

### 3) Uji Validitas Omzet Penghasilan

Dalam pengukuran ini peneliti mengukur tingkat kevalidan kuisioner Omzet Penghasilan yang berjumlah 6 butir pernyataan. Setiap butir pernyataan akan diuji tingkat validitasnya dengan menggunakan SPSS yang memberikan hasil seperti yang terdapat pada lampiran. Berikut adalah penjelasan dari hasil pengukuran variabel Omzet Penghasilan.

**Tabel 4.9**  
**Uji Validitas Omzet Penghasilan**

<b>Omzet Penghasilan</b>	<b>R hitung</b>	<b>R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,717	0,196	Valid
2	0,583	0,196	Valid
3	0,707	0,196	Valid
4	0,748	0,196	Valid
5	0,755	0,196	Valid
6	0,686	0,196	Valid

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Berdasarkan uji validitas variabel Omzet Penghasilan diperoleh nilai reliabilitas lebih besar dibandingkan dengan 0,1966. Maka dapat dikatakan variabel Omzet Penghasilan dinyatakan valid.

#### **4) Uji Validitas Kepatuhan wajib pajak UMKM**

Dalam hal ini peneliti mengukur tingkat kevalidan kuisioner kepatuhan wajib pajak yang berjumlah 6 butir item pernyataan. Setiap item butir pernyataan akan diuji tingkat validitasnya meggunaka SPSS yang memberikan hasil yang terdapat dilampiran. Berikut ini adalah penjelasan dari hasil output variabel kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 4.10**  
**Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

<b>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</b>	<b>R hitung</b>	<b>R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,424	0,1966	Valid
2	0,657	0,1966	Valid
3	0,675	0,1966	Valid
4	0,671	0,1966	Valid
5	0,711	0,1966	Valid
6	0,643	0,1966	Valid

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Berdasarkan uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diperoleh nilai reliabilitas lebih besar dibandingkan dengan 0,1966. Maka dapat dikatakan variabel Kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan valid.

#### **b. Uji Realibilitas Instrumen**

Realibilitas adalah suatu pengujian instrument untuk memperoleh tingkat ketepatan instrument yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa item butir pernyataan akan dapat dipercaya apabila nilai *cronbach Alpha* diatas 0,07.

**Tabel 4.11**  
**Uji Reliabilitas Instrumen**

Variabel	R hitung	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
PP No 23 Tahun 2018	0,753	0,07	Reliabel
Self Assesment System	0,790	0,07	Reliabel
Omzet Penghasilan (X3)	0,789	0,07	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,704	0,07	Reliabel

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas instrument variabel PP No 23 tahun 2018 (X1) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,753, reliabilitas instrument variabel *self assessment system* (X2) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,790, reliabilitas instrument variabel omzet penghasilan (X3) diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,789 dan reliabilitas instrument variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) diperoleh nilai reliabilitas 0,704. Kuisisioner dapat dikatakan reliabel apabila nilai  $\alpha > 0,07$ , dan dari hasil penelitian menyatakan nilai *Cronbach alpha* variabel  $> 0,07$  maka kuisisioner tersebut dikatakan *reliable*. Dengan demikian instrument variabel PP No 23 tahun 2018, *self assessment system*, omzet penghasilan serta kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dikatakan *reliabel*.

#### c. Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengaruh PP No 23 tahun 2018, *Self Assesment System*, Omzet penghasilan, serta



kepatuhan wajib pajak UMKM. Berikut ini adalah hasil uji statistic deskriptif.

**Table 4.12**  
**Descriptive Statistics**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PP No 23 Tahun 2018	10	9	25	19.2	3.146
<i>Self Assessment System</i>	10	9	25	16.8	3.487
Omzet Penghasilan	10	11	30	21.7	4.133
Kepatuhan Wajib Pajak	10	14	30	23.6	3.285
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Dari table diatas menjelaskan bahwa variabel PP No 23 tahun 2018 memiliki minimum responden sebesar 9 dan maximum responden sebesar 25 responden, dengan rata-rata total sebanyak 19,20 dan standar deviasi sebesar 3.146. variabel *Self assessment system* memiliki minimum responden sebesar 9 dan maximum responden sebesar 25, dengan rata-rata total sebesar 16,86 dan standar deviasi 3,487. Variabel omzet penghasilan memiliki minimum responden sebesar 11 dan maximum responden 30, dengan rata-rata total sebesar 21,78 dan standar deviasi sebesar 4.133. variabel kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki minimum responden sebesar 14 dan maximum responden sebesar 30, dengan rata-rata total sebesar 23,67 dan standar deviasi sebesar 3.285.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik yaitu meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah suatu alat untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji yang diterapkan adalah uji *Kolmogorov Smirnov* sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai sig (signifikansi)  $> 0,05$  maka dikatakan data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai sig (signifikansi)  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

**Table 4.13**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

				Unstandardiz
N				100
Parameters <sup>a,b</sup>	Normal		Mean	.0000000
			Std.	2.86452580
Differences	Most	Extreme	Absolute	.060
			Positive	.038
			Negative	-.060
Test Statistic				.060
Asymp. Sig. (2-tailed)				.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Berdasarkan data table diatas, menunjukkan nilai *Asymp.Sig* (2-tailed) sebesar 0,200. Data dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai signifikansi  $> \alpha 0,05$ . Karena nilai signifikan  $>$  dari  $\alpha$  (0,200

$> 0,05$ ), maka dapat dikatakan  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa data terdistribusi secara normal.

#### b. Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah suatu uji untuk mengukur apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Dalam uji ini dapat disimpulkan jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10,00$  maka dikatakan dalam model regresi terjadi gejala multikolonieritas.

**Table 4.14**  
**Uji Multikolonieritas**

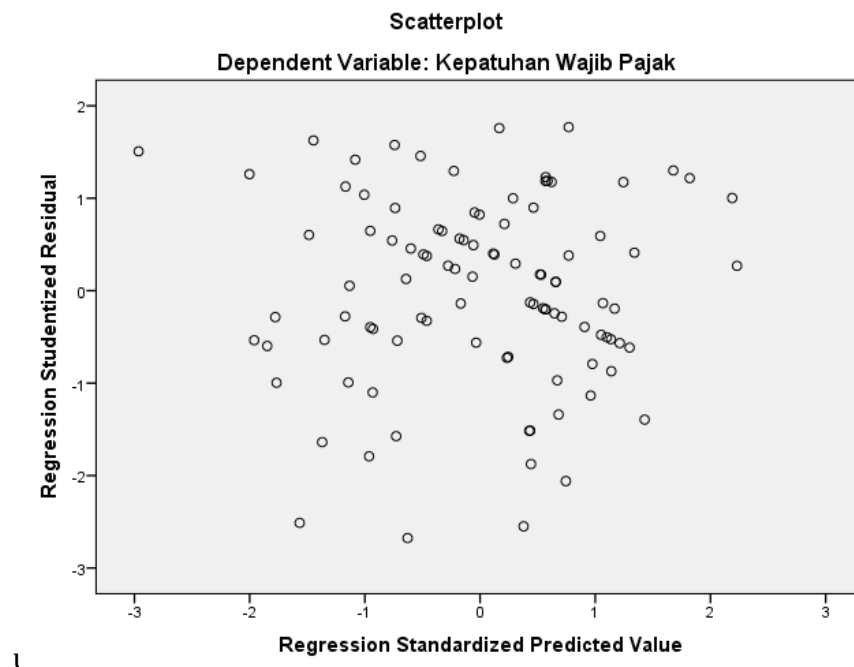
Model	Collinearity	
	Toleran	VIF
1 PP No 23 Tahun 2018	.723	1.384
<i>Self Assesment System</i>	.788	1.269
Omzet Penghasilan	.599	1.670

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Berdasarkan data dari diatas menunjukkan nilai *tolerance* PP No 23 tahun 2018 sebesar 0,723, *tolerance self assessment system* sebesar 0,788, *tolerance omzet penghasilan* sebesar 0,599 ( $>$ ) 0,10. Nilai VIF PP No 23 tahun 2018 sebesar 1,384, VIF *self assessment system* sebesar 1,269, VIF omzet penghasilan sebesar 1,670 lebih kecil ( $<$ ) 10,00 sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa regresi terbebas dari multikolonieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah suatu alat untuk mengukur apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas akan tetapi apabila berbeda disebut heteroskedastisitas.



**Gambar 4.2**

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : olah data SPSS, 2020

Dari grafik *scatterplots* diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### 3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi merupakan hubungan secara linier dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, dengan tujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

**Table 4.15**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardize		Standar	t	Sig.
	B	Std.	Beta		
1 (Constant)	13.898	2.110		6.585	.000
PP No 23 Tahun 2018	.113	.109	.108	1.035	.303
<i>Self Assesment System</i>	.034	.094	.036	.357	.722
Omzet Penghasilan	.323	.091	.406	3.532	.001

Sumber : olah data SPSS, 2020

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat nilai konstanta sebesar 13.898, PP No 23 tahun 2018 sebesar 0,113, *self assessment system* sebesar 0,034 dan omzet penghasilan sebesar 0,323 sehingga diperoleh persamaan regresi yaitu :

$$Y = 13.898 + 0,113 X_1 + 0,034 X_2 + 0,323X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut dapat diambil analisis sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 13.898 berarti menunjukkan jika PP No 23 tahun 2018, *self assessment system* dan omzet penghasilan bernilai tetap atau

konstan maka peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM akan tetap sebesar 13.898.

- b. Koefisien regresi untuk variabel PP No 23 tahun 2018 sebesar 0,113 artinya apabila variabel PP No 23 tahun 2018 mengalami peningkatan sementara variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal akan mengalami peningkatan sebesar 0,113
- c. Koefisien regresi untuk variabel *self assesment system* sebesar 0,034 artinya apabila variabel *self assessment system* mengalami peningkatan sementara variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal akan mengalami peningkatan sebesar 0,034
- d. Koefisien regresi omzet penghasilan sebesar 0,323 artinya apabila variabel omzet penghasilan mengalami peningkatan sementara variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal akan mengalami peningkatan sebesar 0,323

## 2) Uji Hipotesis

### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh dari satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Adapun kriteria diterima atau ditolakanya hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi  $< 0,025$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi  $> 0,025$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

**Table 4.16**  
**Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized		Standardize	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.898	2.110		6.585	.000
PP No 23 Tahun 2018	.113	.109	.108	1.035	.303
<i>Self Assesment System</i>	.034	.094	.036	.357	.722
Omzet Penghasilan	.323	.091	.406	3.532	.001

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4.17 diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4.17 diperoleh suatu kesimpulan bahwa PP No 23 tahun 2018 tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan  $0,303 > 0,025$ . Maka variabel PP No 23 tahun 2018 (H1) ditolak.

- 2) Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4.17 diperoleh suatu kesimpulan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai signifikan  $0,722 > 0,025$ . Maka variabel *self assessment system* (H2) ditolak.
- 3) Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4.17 diperoleh suatu kesimpulan bahwa omzet penghasilan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. dengan nilai signifikan  $0,001 < 0,025$ . Maka variabel omzet penghasilan (H3) diterima.

### 3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya adalah suatu alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Apabila nilainya mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua penjelasan terhadap variasi variabel dependen.

**Table 4.17**

#### **Koefisien Determinasi**

Model	R	R	Adjusted R Square	Std. Error of the
1	.489 <sup>a</sup>	.239	.216	2.909

Sumber : Olah data SPSS, 2020

Berdasarkan table diatas menunjukkan R sebesar 0,489 berarti hubungan keeratan secara bersama-sama antara variabel dependen dan



variabel independen cukup kuat karena R lebih besar dari 0,05. Nilai Adjust R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,216 atau 21,6% PP No 23 tahun 2018, *self assessment system* dan omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Tegal. Adapun sisanya sebesar 78,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

### **E. Pembahasan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan SPSS versi 22. Pada pengujian ini diperoleh hasil bahwa variabel independen yang terdiri dari PP No 23 tahun 2018, *self assessment system* serta omzet penghasilan dapat diketahui variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diperoleh hasil sebagai berikut

1. Untuk menguji hipotesis pertama, diduga PP No 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 1,035 dan nilai signifikansi dari variabel PP No 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0,303 lebih besar dari 0,025 ( $0,303 > 0,025$ ). Hal ini berarti menunjukkan bahwa PP No 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini H1 ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku jika tidak memiliki kesadaran sendiri dari wajib pajak maka tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jadi meskipun pemerintah sudah menurunkan tariff pajak untuk UMKM tetapi dalam diri wajib pajak

masih menganggap pajak itu sebuah beban maka tarif 0,5% masih tergolong tinggi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meikhati & Kasetyaningsih (2019) menyatakan hasil bahwa Penerapan PP No 23 tahun 2018, yang menjadikan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. seorang wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi cenderung akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Noviana, Afifudin, & Hariri (2020) menyatakan bahwa variabel Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Untuk menguji hipotesis kedua, diduga *Self Assesment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan hasil pengujian diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 0,357 dan nilai signifikansi dari variabel *self assesment system* sebesar 0,722 lebih besar dari 0,025 ( $0,722 > 0,025$ ). Hal ini berarti menunjukkan bahwa *self assesment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini H2 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ingrid Grace Manuputty, Swanto Sirait (2016) menyatakan bahwa penerapan *self assesment system* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Sedangkan menurut Lasmaya & Fitriani (2017) menyatakan bahwa *self assesment system* berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian peneliti sejalan dengan Ingrid Grace Manuputty, Swanto Sirait (2016) sedangkan hasil dari Lasmaya & Fitriani (2017) tidak sejalan dengan hasil penelitian.

3. Untuk menguji hipotesis ketiga, diduga omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan hasil pengujian diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 3,532 dan nilai signifikansi dari variabel omzet penghasilan yaitu sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,025 ( $0,001 < 0,025$ ). Hal ini berarti menunjukkan bahwa omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.

Omzet penghasilan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal, hal ini dikarenakan berdasarkan survei yang peneliti lakukan, kebanyakan wajib pajak merasa lebih mudah dan lebih sadar untuk membayar pajak ketika omzet mereka tinggi atau ketika memang omzet mereka sudah mencapai kriteria yang harus dikenakan pajak oleh pemerintah maka mereka akan cenderung lebih mudah dan lebih patuh untuk membayar pajak, dibandingkan ketika mereka memiliki omzet yang rendah, kebanyakan wajib pajak UMKM merasa keberatan khususnya mereka yang masih dalam kategori mikro, apabila dikenakan pajak atas omzet yang tidak seberapa (rendah) yang mereka terima maka mereka akan cenderung menolak atau tidak membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Arviana & Sadjiarto (2014) yang menyatakan bahwa omzet penghasilan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga penelitian dari Rizajayanti, (2017) dalam penelitian ini menyatakan bahwa variable omzet penghasilan tidak memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan dalam penelitian ini omzet penghasilan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. PP No 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal, dikarenakan banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tarif terbaru. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi 0.303 lebih besar dari 0.025.
2. *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal, dikarenakan banyak pelaku UMKM yang tidak paham tentang tata cara perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi 0.722 lebih besar dari 0.025.
3. Omzet penghasilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal, dikarenakan pelaku UMKM terutama yang usaha mikro kurang pengetahuan tentang perpajakan, apabila dikenakan pajak atas omzet yang tidak seberapa (rendah) yang mereka terima maka mereka akan cenderung menolak atau tidak membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0.025.
4. Hasil koefisien determinasi menunjukkan PP No 23 tahun 2018, *self assessment system* dan omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM di Kota Tegal sebesar 21,6% sedangkan sisanya sebesar 78,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya membayar pajak untuk kepentingan Negara, agar para pelaku UMKM tidak menjadikan pajak itu suatu beban yang membeberatkan bagi mereka sehingga akan meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM dalam membayar pajak.
2. Diharapkan pemerintah dapat memberikan banyak edukasi dan sosialisasi tentang penerapan tata cara perpajakan dan lebih mempermudah lagi tata cara perpajakannya, khususnya pada bagian perhitungan perpajakan, banyak sekali UMKM yang masih belum paham mengenai cara menghitung sendiri pajak mereka.
3. Pemerintah diharapkan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana caranya agar UMKM dapat memasarkan produk mereka lebih baik lagi sehingga meningkatkan minat pembeli terhadap produk yang dijual oleh UMKM sehingga dapat meningkatkan omzet bagi mereka dan meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM dalam membayar pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian tidak hanya di wilayah kota namun juga merambah ke kabupaten atau menambah ke kota yang lainnya yang lebih besar. Diharapkan juga peneliti

selanjutnya memperluas variabel independen penelitian karena dari hasil penelitian masih terdapat 78,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

5. Bagi para pelaku UMKM Omzet merupakan suatu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga diharapkan para UMKM melaporkan omzet penghasilan dengan sebenar-benarnya serta bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan setiap masing-masing usaha agar pemerintah dapat mempertimbangkan tarif serta tata cara yang sesuai dengan kemampuan para UMKM dan tidak memberatkan.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuisisioner (angket) dari responden UMKM di Kota Tegal yang menjadi objek penelitian
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 Variabel yaitu PP No 23 tahun 2018 (X1), *Self Assesment System* (X2), dan Omzet Penghasilan (X3)

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, E. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Study Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). *Jurnal Transparansi* , Vol. 1 No. 1, 12-28.
- Anggara, A. B., & Sulistiyanti, U. (2017). Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember* .
- Arviana, N., & Sadjiarto, A. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review* , Vol. 4 No. 1.
- Ghozali, I. (2018). *SPSS Aplikasi Analisis Multivariate Statistik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ispiadi, R. (2017). *Pengaruh Self Assesment System, tingkat pendidikan, gender dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru*. Pekanbaru.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Realisasi Penerimaan Negara*. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2018). *Data UMKM 2017-2018*.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis* , Vol 11, No 2.
- LPPI. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Maharani, I. S. (2015). Pengaruh Self Assesment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *Jom FEKON* , Vol. 2 No.2.
- Manuputty, I. G., & Sirait, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. *Media Akuntansi Perpajakan* , Vol. 1, No. 2.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.



- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pda Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-JRA* , Vol.09 No. 04.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 23 tahun 2018, Pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak umkm diMakassar. *Paulus Journal Of Accounting* , Vol 1 No 1.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Menetri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99 /PMK 03 / 2018*. Jakarta.
- Pengaruh self assesment system, sosialisasi pajak dan surat tagihan pajak terhadap kepatuhan pajak (Juli 2019).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizajayanti, D. S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JOM Fekon* , Vol.4 No. 1.
- Sekaran, U. (2016). *Metodologi penelitian untuk bisnis, Edisi 4 - Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi penelitian untuk bisnis, Edisi 4 - Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang. *JAMSWAP* , Vol. 3 No. 3, 1-8.
- Taffy, J. (2019). *Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo*.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Yuliyannah, P. R. (2018). *Pengaruh omzet penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assesment System terhadap kepatuhan pajak UMKM.*

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### Kuisisioner

**PENGARUH PENERAPAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018,  
SELF ASSESMENT SYSTEM, DAN OMZET PENGHASILAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DI KOTA TEGAL**

---

Kepada :

Yth. Bapak /Ibu/Saudara/i  
Wajib pajak UMKM  
KPP Pratama Kota Tegal

Responden yang saya hormati,

Perkenalkan saya adalah mahasiswa Program Strata Satu (SI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal yang sedang mengadakan penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir berupa skripsi.

Nama : Tri Mustikasari

Npm : 4316500188

Dalam rangka penelitian ini untuk skripsi sayayang berjudul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, *Self Assesment System*, Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal”. Maka saya memohon bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/I untuk berkenan mengisi kuisisioner yang saya lampirkan bersama surat ini.

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Peneliti menjamin sepenuhnya kerahasiaan identitas seluruh jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I sesuai dengan etika penelitian . peneliti mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan atas hadirnya kuisisioner ini. Atas kesediaan dan perhatian serta kerjasamanya peneliti ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Tri Mustikasari

4316500188

### A. Identitas Responden

- Nama /Nama Usaha :
- Jenis kelamin : a. Laki-Laki                      b. Perempuan
- Usia : a. dibawah 30 tahun  
b. 30-40 tahun  
c. diatas 40 tahun
- Pendidikan : a. SLTA/Sederajat  
b. Akademi (DI/DII/DIII)  
c. Sarjana (S1/Sederajat)  
d. Lain-lain
- Lama Usaha : a. < 3 Tahun  
b. 3-10 Tahun  
c. > 10 Tahun
- Penghasilan Perbulan : a.  $\leq$  Rp 3.000.000  
b. Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000  
c. Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000  
d.  $\geq$  Rp 10.000.000

### B. Petunjuk Pengisian

Mohon terlebih dahulu Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk membaca pernyataan-pernyataan dengan cermat, sebelum mengisinya.

Berilah tanda silang (X) atau ceklis (✓) untuk setiap pernyataan di bawah ini yang menggambarkan persepsi anda, dimana:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
2. Tidak Setuju (TS) = 2
3. Netral (N) = 3
4. Setuju (S) = 4
5. Sangat Setuju (SS) = 5

Tanda Pengisian

Tanda Tangan

**C. Kuisioner**

Mohon jawab pernyataan-pernyataan berikut dengan memberikan tanda (√) sesuai dengan hasil pengamatan Bapak/Ibu/Sdr.

Variable Y : Kepatuhan Wajib Pajak.

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib pajak berusaha memahami ketentuan pajak.					
2.	Wajib pajak melaporkan SPT Masa/Tahunan sebelum tanggal jatuh tempo.					
3.	Wajib pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4.	Wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang dengan benar.					
5.	Wajib pajak membayar pajak sesuai tunggakan.					
6.	Wajib pajak tidak menghindar untuk menyetor tunggakan pajak.					

Variable X1 : Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan final 0,5% berlaku sejak 1 juli 2018					
2.	PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah pajak penghasilan yang bersifat final.					
3.	PP Nomor 23 Tahun 2018 dikhususkan untuk pengusaha dengan					

	peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp 4,8 Milliar.					
4.	Dengan berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 saya lebih tertib dalam membayar pajak.					
5.	Besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 0,5 % dihitung dari total omset satu tahun.					

Variable (X2) : *Self Assesment System* (Menghitung, Melaporkan dan Membayar sendiri)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Dengan adanya system <i>Self Assessment System</i> saya lebih bertanggung jawab dengan pengelolaan pajak saya.					
2.	Saya menerapkan <i>Self Assessment System</i> dan memiliki kemampuan serta pemahaman tentang cara menghitung jumlah pajak terutang yang saya tanggung.					
3.	Saya menerapkan <i>Self Assessment System</i> dan saya menghitung sendiri pajak yang saya setorkan.					
4.	Saya menerapkan <i>Self Assessment System</i> dan saya membayarkan sendiri pajak terutang saya ke KPP Pratama Tegal.					
5.	Saya menerapkan <i>Self Assessment System</i> saya paham cara melaporkan SPT, dan saya melaporkan SPT saya					

	sendiri.					
--	----------	--	--	--	--	--

## Variable X3 : Omzet Penghasilan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Penghasilan merupakan objek pajak, dan berapapun Omzet Penghasilan yang diperoleh maka akan dikenai pajak.					
2.	Penerapan pph final 0,5% untuk UMKM sudah sesuai dan tepat					
3.	Wajib pajak harus transparan dalam melaporkan pajak yang terutang.					
4.	Saya menerapkan pencatatan atau pembukuan dalam menghitung jumlah omzet yang saya terima.					
5.	Semakin lama UMKM berdiri maka semakin tinggi pula omzet yang diterima oleh wajib pajak.					
6.	Semakin lama UMKM berdiri maka kualitas produk yang dijual semakin baik.					



## Lampiran 2

### Data Penelitian Variabel PP Nomor 23 Tahun 2018

Responden	PP Nomor 23 Tahun 2018					X1
	P1	P2	P3	P4	P5	Total X1
1	3	3	3	3	3	15
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	3	3	3	5	3	17
6	4	4	3	4	5	20
7	3	3	4	2	3	15
8	4	4	4	4	4	20
9	3	2	3	3	3	14
10	3	3	3	4	4	17
11	3	4	4	4	3	18
12	3	3	4	3	3	16
13	3	3	3	3	3	15
14	3	3	3	4	4	17
15	5	5	5	5	5	25
16	4	4	4	4	4	20
17	4	5	5	4	5	23
18	4	4	4	4	4	20
19	3	3	2	3	2	13
20	3	3	3	4	4	17
21	4	4	4	4	4	20
22	3	4	3	4	3	17
23	4	3	4	4	4	19
24	3	4	3	3	4	17
25	3	3	3	4	3	16
26	4	4	4	4	4	20
27	3	4	3	4	4	18
28	5	5	4	4	4	22
29	4	4	5	3	1	17
30	5	5	5	5	5	25

31	5	4	4	5	5	23
32	1	5	3	4	4	17
33	4	4	4	4	4	20
34	4	3	4	4	4	19
35	4	3	4	4	4	19
36	5	5	5	3	4	22
37	4	2	3	3	3	15
38	5	5	4	4	4	22
39	5	5	5	5	5	25
40	3	5	4	5	3	20
41	3	4	4	4	4	19
42	2	2	5	3	4	16
43	4	4	4	4	4	20
44	3	5	5	3	4	20
45	2	4	4	4	4	18
46	3	4	5	4	4	20
47	5	2	5	4	2	18
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	5	5	5	23
50	4	4	2	4	4	18
51	5	5	5	5	5	25
52	4	4	4	3	3	18
53	4	3	5	5	5	22
54	3	3	3	4	2	15
55	4	3	4	4	4	19
56	4	3	4	5	3	19
57	5	5	5	4	4	23
58	3	4	5	4	4	20
59	4	5	5	5	5	24
60	4	4	4	4	4	20
61	3	4	4	4	4	19
62	5	4	4	5	5	23
63	4	5	5	5	5	24
64	5	5	4	4	4	22
65	5	5	5	5	5	25
66	4	4	5	4	4	21

67	4	4	5	5	4	22
68	5	5	5	4	4	23
69	4	4	4	4	4	20
70	5	5	5	4	3	22
71	4	4	4	3	3	18
72	4	4	5	5	5	23
73	3	4	3	3	2	15
74	5	5	5	4	3	22
75	4	4	5	2	2	17
76	3	4	5	5	5	22
77	3	4	4	3	4	18
78	4	3	4	4	4	19
79	2	3	3	4	5	17
80	5	5	5	5	4	24
81	2	3	4	5	5	19
82	4	5	5	4	3	21
83	4	3	3	2	2	14
84	3	1	1	2	2	9
85	4	3	2	4	4	17
86	5	5	4	4	4	22
87	5	5	4	4	4	22
88	4	3	4	3	2	16
89	4	3	2	4	3	16
90	4	5	3	4	4	20
91	3	3	4	5	4	19
92	2	3	2	3	4	14
93	4	5	5	5	5	24
94	4	3	2	1	4	14
95	4	5	3	2	2	16
96	4	3	2	3	4	16
97	4	5	4	4	3	20
98	5	4	3	2	4	18
99	4	4	4	4	4	20
100	4	3	3	3	2	15

### Lampiran 3

#### Data Penelitian Variabel *Self Assessment System*

Responden	<i>Self assesment system</i>					<b>X2</b>
	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>Total X2</b>
1	3	3	5	3	4	18
2	5	4	4	4	3	20
3	4	4	4	4	4	20
4	3	4	3	5	3	18
5	5	5	5	4	5	24
6	4	4	4	5	3	20
7	2	2	2	2	2	10
8	4	4	3	4	4	19
9	3	3	3	3	3	15
10	3	4	4	4	4	19
11	3	3	3	3	4	16
12	3	3	3	2	3	14
13	3	3	2	2	2	12
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	3	3	3	15
16	5	5	5	5	5	25
17	5	4	4	5	5	23
18	4	3	3	4	4	18
19	4	4	3	3	4	18
20	4	3	3	3	3	16
21	4	4	4	4	4	20
22	4	3	2	4	3	16
23	3	1	1	2	2	9
24	4	3	3	3	3	16
25	3	3	3	2	3	14
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	5	5	3	21
28	3	4	4	3	5	19
29	3	3	4	3	4	17
30	5	5	5	5	5	25

31	4	4	3	3	4	18
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	4	3	3	3	4	17
35	4	3	3	3	4	17
36	5	5	5	5	5	25
37	4	4	3	3	3	17
38	4	4	4	4	4	20
39	3	4	3	3	3	16
40	3	3	3	4	4	17
41	3	4	3	4	4	18
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20
44	2	2	2	4	4	14
45	4	4	4	4	4	20
46	4	3	2	3	3	15
47	4	4	3	3	3	17
48	3	3	3	3	3	15
49	2	2	2	2	2	10
50	4	4	2	4	4	18
51	3	2	2	2	2	11
52	2	2	3	2	3	12
53	4	4	4	4	4	20
54	3	3	3	3	3	15
55	4	4	4	4	4	20
56	3	4	3	4	4	18
57	4	3	3	3	3	16
58	3	3	3	2	4	15
59	4	4	3	3	3	17
60	3	3	3	3	3	15
61	4	4	3	3	3	17
62	4	3	4	3	4	18
63	3	3	2	2	2	12
64	4	3	4	3	3	17
65	4	5	5	4	5	23
66	3	3	3	3	3	15

67	2	2	2	4	2	12
68	3	4	5	5	5	22
69	4	4	4	5	5	22
70	4	4	2	3	3	16
71	3	2	2	2	2	11
72	4	4	3	3	3	17
73	3	4	4	4	4	19
74	2	2	2	2	3	11
75	4	4	3	1	3	15
76	3	5	3	2	2	15
77	3	4	4	3	1	15
78	4	4	3	5	3	19
79	5	4	1	3	1	14
80	5	4	3	1	2	15
81	3	5	2	2	2	14
82	4	5	5	5	1	20
83	5	3	2	1	5	16
84	4	3	3	1	2	13
85	3	4	4	5	5	21
86	4	3	4	3	5	19
87	4	3	3	3	4	17
88	4	2	2	2	3	13
89	3	1	3	4	3	14
90	3	2	2	3	4	14
91	3	3	4	4	5	19
92	3	2	3	2	3	13
93	4	4	4	5	4	21
94	2	2	4	3	4	15
95	3	2	4	4	4	17
96	3	1	1	2	2	9
97	3	2	3	2	4	14
98	4	3	4	3	1	15
99	4	3	2	2	3	14
100	5	3	2	4	4	18

### Lampiran 4

#### Data penelitian variabel omzet penghasilan

Responden	Omzet Penghasilan						X3
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total X3
1	2	4	3	4	5	4	22
2	4	3	5	4	3	3	22
3	4	4	4	4	4	5	25
4	3	3	4	5	4	3	22
5	5	4	3	5	5	5	27
6	3	3	4	4	4	3	21
7	1	1	3	3	1	5	14
8	3	3	4	4	5	5	24
9	2	3	3	3	2	3	16
10	4	3	4	4	3	4	22
11	3	3	5	4	3	4	22
12	2	3	3	3	2	3	16
13	2	2	3	2	1	4	14
14	3	3	3	3	3	3	18
15	4	5	5	5	5	5	29
16	5	4	5	5	5	5	29
17	4	4	5	4	5	4	26
18	4	3	3	3	3	4	20
19	3	2	3	4	3	3	18
20	3	4	4	3	3	4	21
21	4	5	4	4	4	4	25
22	3	3	3	2	3	3	17
23	3	3	4	1	3	5	19
24	3	3	3	3	3	3	18
25	2	3	4	4	4	3	20
26	4	4	3	4	4	5	24
27	4	4	4	5	5	5	27
28	5	5	4	3	2	3	22
29	4	1	3	3	4	5	20
30	5	5	5	5	5	5	30

31	4	4	4	5	5	5	27
32	5	4	4	4	5	5	27
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	3	3	3	4	21
36	2	2	4	4	4	5	21
37	4	2	4	4	5	4	23
38	4	4	4	4	2	4	22
39	5	1	3	4	4	4	21
40	5	5	4	4	3	5	26
41	4	4	4	4	4	5	25
42	2	1	4	5	3	5	20
43	4	4	4	4	4	4	24
44	4	1	4	4	2	5	20
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	1	4	4	1	4	18
47	5	5	5	5	4	4	28
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	2	5	2	4	4	21
51	4	3	4	4	4	4	23
52	4	3	3	4	4	4	22
53	4	4	4	4	4	4	24
54	4	4	5	3	1	4	21
55	5	2	5	5	5	5	27
56	4	4	4	4	4	5	25
57	4	4	4	5	5	5	27
58	4	3	5	5	5	5	27
59	3	3	4	4	4	5	23
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	4	4	4	4	4	24
62	4	4	4	4	5	5	26
63	4	3	4	5	4	4	24
64	2	3	4	5	5	5	24
65	5	5	5	5	5	5	30
66	4	3	5	5	5	5	27



67	4	4	3	2	3	3	19
68	3	4	4	4	4	4	23
69	5	4	4	4	5	5	27
70	3	5	5	5	5	5	28
71	3	1	4	3	3	3	17
72	3	2	4	4	4	4	21
73	3	3	4	4	4	5	23
74	4	4	4	4	4	4	24
75	2	3	1	5	3	4	18
76	3	4	2	3	3	3	18
77	3	3	4	2	2	1	15
78	3	2	2	2	4	4	17
79	1	3	3	2	1	4	14
80	3	3	4	4	5	5	24
81	4	4	4	5	5	5	27
82	2	3	1	4	2	2	14
83	3	2	3	4	3	3	18
84	1	3	2	1	2	2	11
85	4	4	4	4	4	4	24
86	2	3	3	3	3	3	17
87	4	3	4	3	4	4	22
88	3	2	4	4	4	4	21
89	1	1	2	3	4	3	14
90	3	2	4	4	3	2	18
91	3	3	2	2	4	4	18
92	4	3	3	2	4	3	19
93	4	4	3	4	4	4	23
94	3	2	2	1	4	3	15
95	3	4	4	3	4	4	22
96	4	3	2	3	2	3	17
97	4	4	5	5	3	3	24
98	4	4	3	2	2	2	17
99	2	4	3	3	3	2	17
100	2	4	4	3	3	4	20

### Lampiran 5

#### Data penelitian variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak						Y
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total Y
1	4	4	4	5	5	5	27
2	4	5	5	5	5	5	29
3	5	5	5	5	5	5	30
4	5	4	4	5	4	3	25
5	4	4	5	5	5	4	27
6	4	4	4	3	4	3	22
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	4	4	4	4	24
9	2	2	3	3	2	2	14
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	5	25
12	4	4	5	4	4	5	26
13	3	3	3	3	3	4	19
14	3	4	4	4	3	3	21
15	5	5	5	5	5	5	30
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	4	5	5	5	5	29
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	3	3	4	4	3	21
20	4	4	4	4	5	4	25
21	4	4	5	4	4	5	26
22	4	3	4	3	4	4	22
23	4	3	3	5	5	5	25
24	3	3	3	3	3	4	19
25	4	4	4	4	4	3	23
26	5	4	5	5	5	4	28
27	5	3	4	4	5	3	24
28	4	4	4	5	5	5	27
29	4	2	4	4	5	3	22
30	4	4	5	5	5	5	28

31	4	5	4	4	5	5	27
32	3	2	4	4	4	5	22
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	3	3	5	23
36	4	4	4	4	5	5	26
37	4	4	4	4	5	5	26
38	5	4	4	4	4	4	25
39	3	3	4	4	3	5	22
40	3	4	4	5	5	3	24
41	4	4	4	4	4	5	25
42	4	5	4	4	5	5	27
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	2	4	5	5	4	25
45	4	1	4	3	4	4	20
46	4	4	5	5	5	4	27
47	5	4	4	4	4	4	25
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	5	5	5	5	28
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	4	5	4	5	3	25
52	5	4	4	4	4	4	25
53	4	4	4	4	4	4	24
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	4	4	4	4	4	24
56	5	4	4	4	4	4	25
57	4	4	4	4	4	4	24
58	5	4	4	4	4	4	25
59	4	4	5	5	5	5	28
60	5	5	5	4	4	4	27
61	5	3	3	3	3	3	20
62	4	4	4	4	4	3	23
63	3	2	4	4	4	4	21
64	4	3	3	4	5	5	24
65	5	5	5	5	5	5	30
66	4	4	4	4	4	4	24

67	3	3	4	4	4	4	22
68	4	4	5	5	5	5	28
69	5	3	4	4	4	4	24
70	3	3	4	4	4	4	22
71	4	4	3	5	5	4	25
72	5	4	4	4	4	4	25
73	4	4	5	5	4	4	26
74	4	3	4	5	5	4	25
75	3	4	5	5	4	3	24
76	5	5	1	5	3	5	24
77	3	3	3	4	5	5	23
78	4	3	1	5	3	5	21
79	5	2	2	4	2	5	20
80	3	4	3	5	1	3	19
81	5	2	3	4	5	4	23
82	3	2	3	1	5	3	17
83	4	3	2	4	3	3	19
84	4	5	1	5	4	4	23
85	4	2	1	4	4	2	17
86	4	2	5	3	3	4	21
87	5	4	3	3	3	4	22
88	4	4	5	5	3	3	24
89	5	4	3	2	1	4	19
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	3	2	4	2	2	18
92	5	5	4	4	4	3	25
93	4	5	5	3	3	2	22
94	4	3	3	2	2	4	18
95	3	4	4	5	5	4	25
96	3	2	3	4	4	4	20
97	3	4	3	4	4	1	19
98	3	4	4	5	5	5	26
99	3	2	3	4	2	3	17
100	4	3	2	2	3	1	15

### Lampiran 6

#### Hasil Uji Validitas PP Nomor 23 tahun 2018

##### Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	PP No 23 Tahun 2018
X1.1 Pearson Correlation	1	.442 <sup>*</sup>	.379 <sup>*</sup>	.187	.147	.602 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.062	.143	.000
N	100	100	100	100	100	100
X1.2 Pearson Correlation	.442 <sup>*</sup>	1	.526 <sup>*</sup>	.350 <sup>*</sup>	.349 <sup>*</sup>	.755 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
X1.3 Pearson Correlation	.379 <sup>*</sup>	.526 <sup>*</sup>	1	.466 <sup>*</sup>	.330 <sup>*</sup>	.771 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000
N	100	100	100	100	100	100
X1.4 Pearson Correlation	.187	.350 <sup>*</sup>	.466 <sup>*</sup>	1	.593 <sup>*</sup>	.729 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.062	.000	.000		.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
X1.5 Pearson Correlation	.147	.349 <sup>*</sup>	.330 <sup>*</sup>	.593 <sup>*</sup>	1	.684 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.143	.000	.001	.000		.000
N	100	100	100	100	100	100
PP No 23 Tahun 2018 Pearson Correlation	.602 <sup>*</sup>	.755 <sup>*</sup>	.771 <sup>*</sup>	.729 <sup>*</sup>	.684 <sup>*</sup>	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 7

### Hasil Uji Validitas *Self Assesment System*

#### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Self Assesment System
X2.1	Pearson Correlation	1	.560*	.291*	.274*	.251*	.604**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.006	.012	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.560**	1	.565*	.475*	.279*	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.291**	.565*	1	.593*	.513*	.815**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.274**	.475*	.593*	1	.476*	.787**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.251*	.279*	.513*	.476*	1	.702**
	Sig. (2-tailed)	.012	.005	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Self Assesment System	Pearson Correlation	.604**	.768*	.815*	.787*	.702*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 8

### Hasil Uji Validitas Omzet Penghasilan

#### Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Omzet Penghasilan
X3.1	Pearson Correlation	1	.414**	.472**	.37**	.403**	.347**	.717**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.00	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.414**	1	.295**	.25**	.291**	.144	.583**
	Sig. (2-tailed)	.000		.003	.01	.003	.153	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.472**	.295**	1	.49**	.365**	.422**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003		.00	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.375**	.251**	.490**	1	.536**	.494**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.012	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.403**	.291**	.365**	.53**	1	.524**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.00		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.347**	.144	.422**	.49**	.524**	1	.686**
	Sig. (2-tailed)	.000	.153	.000	.00	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Omzet Penghasilan	Pearson Correlation	.717**	.583**	.707**	.74**	.755**	.686**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.00	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 9

### Hasil Uji Validitas Kepatuhan wajib pajak UMKM

#### Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Kepatuhan Wajib Pajak
Y.1	Pearson Correlation	1	.313**	.090	.122	.107	.163	.424**
	Sig. (2-tailed)		.002	.375	.228	.288	.105	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.313**	1	.370**	.372**	.227*	.231*	.657**
	Sig. (2-tailed)	.002		.000	.000	.023	.021	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.090	.370**	1	.265**	.452**	.277**	.675**
	Sig. (2-tailed)	.375	.000		.008	.000	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.122	.372**	.265**	1	.464**	.356**	.671**
	Sig. (2-tailed)	.228	.000	.008		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.107	.227*	.452**	.464**	1	.371**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.288	.023	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.163	.231*	.277**	.356**	.371**	1	.643**
	Sig. (2-tailed)	.105	.021	.005	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.424**	.657**	.675**	.671**	.711**	.643**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



**Lampiran 10**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

**1. Reliabilitas PP Nomor 23 tahun 2018**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	5

**2. Reliabilitas Self Assesment System**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.790	5

**3. Reliabilitas Omzet Penghasilan**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.789	6

**4. Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.704	6

## Lampiran 11

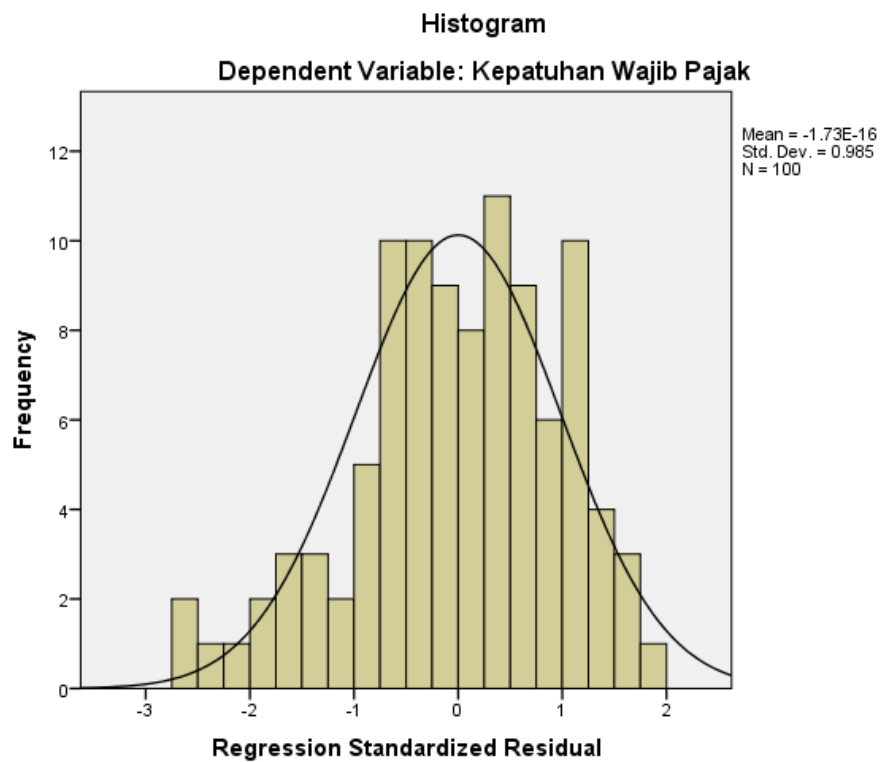
### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### A. Uji Normalitas

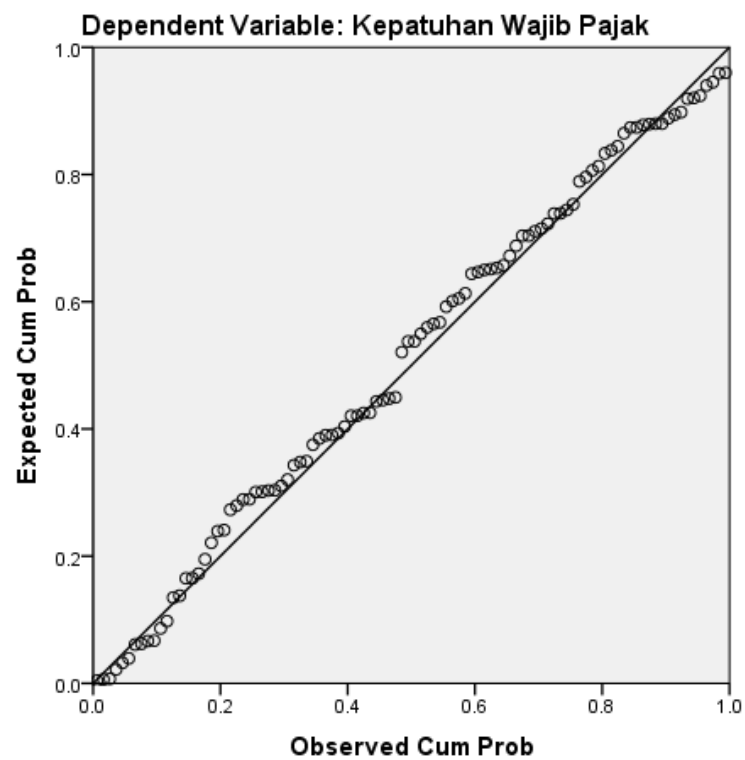
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.86452580
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.038
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



### B. Uji multikolonieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PP No 23 Tahun 2018	.723	1.384
	Self Assesment System	.788	1.269
	Omzet Penghasilan	.599	1.670

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### C. Uji Heteroskedastisitas

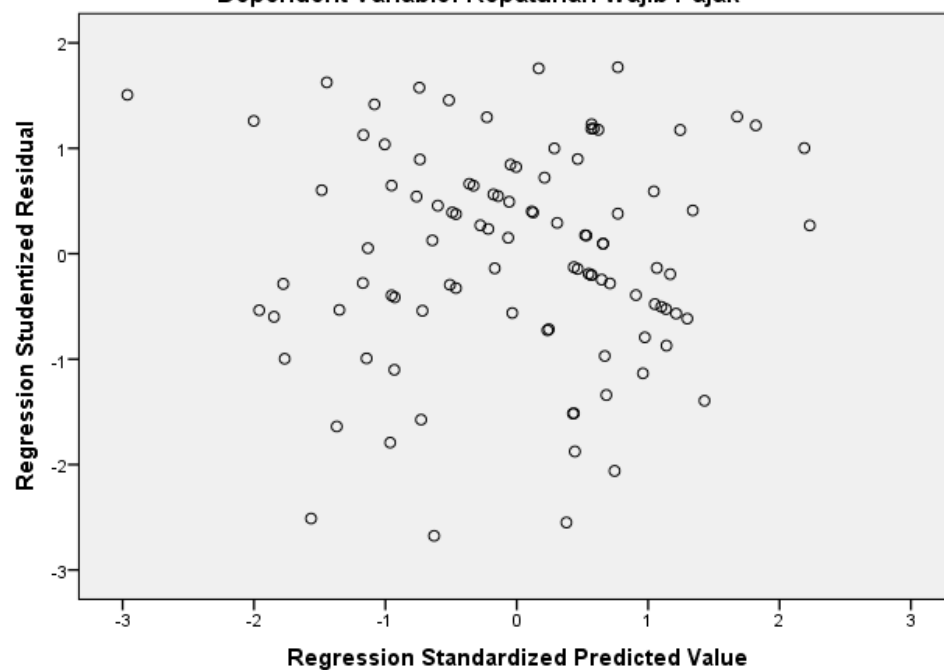
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.284	1.226		2.678	.009
PP No 23 Tahun 2018	-.025	.064	-.047	-.393	.695
Self Assesment System	.048	.055	.100	.877	.383
Omzet Penghasilan	-.060	.053	-.148	-1.134	.260

a. Dependent Variable: ABRESID

**Scatterplot**

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



## Lampiran 12



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 PROGDI : MANAJEMEN, AKUNTANSI, DAN MANAJEMEN PAJAK  
 (STATUS TERAKREDITASI)  
 Jl. Halmahera Km. 1 Telp. (0283) 355720 Tegal

Nomor : 166/K/E/FEB/UPS/VI/2019 Tegal, 10 Juni 2020  
 Lampiran : -  
 Perihal : Ijin Penelitian

Kepada : Yth. Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kota Tegal  
 Jl. Hang Tuah, No. 21, Tegalsari  
 Di- Tegal

Dengan hormat, salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis mahasiswa diwajibkan mengadakan penelitian sebagai bahan menyusun skripsi.

Berkenaan dengan hal itu, mohon berkenaan Bapak/Ibu membantu memberi data yang diperlukan dalam penelitian tersebut kepada mahasiswa :

N a m a : Tri Mustikasari  
 NPM : 4316500188  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Self  
 Assesment System, Dan Omset Penghasilan  
 Terhadap Wajib Pajak UMKM Kota Tegal.

Atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih,



Dekan  
 Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., Akt., CA  
 NIDN: 0628117502

